

# Hak Asasi ala Timur

Oleh  
Ariel Heryanto

**GAGASAN** tentang hak-hak asasi manusia (HAM) berasal dari negeri-negeri Barat. Benarkah gagasan itu tidak cocok untuk masyarakat Indonesia? Mengapa? Hanya karena ia berasal dari luar Indonesia? Karena Indonesia sudah punya versi HAM tersendiri? Seperti apakah itu? Apakah penolakan HAM dari Barat itu bukan sekadar cara untuk menyangkal dan menghindari hak dan kedaulatan rakyat yang bersifat universal?

Hingga kini pertanyaan-pertanyaan tersebut masih membebani diskusi HAM di negeri ini. Tulisan ringkas ini berusaha menawarkan tidak saja kemungkinan jawaban, tetapi juga penafsiran dan perumusan kembali pertanyaan-pertanyaan dan asumsi yang mendasari beberapa pertanyaan itu.

Pada intinya, tulisan ini hendak menyajikan tiga butir pandangan. Pertama, gagasan HAM yang datang dari Barat memang tak bisa dan tak perlu kita jiplak mentah-mentah. Kedua, HAM untuk kita perlu ditempatkan dalam konteks sejarah sosial Indonesia, bukan karena Indonesia punya otonomi atau isolasi dari pengaruh Barat. Bukan karena Indonesia punya "jati diri", tak peduli macam apa substansinya. Ketiga, pertentangan dalam masalah HAM pada intinya terjadi antara pihak bangsa-bangsa versus negara-negara. Bukan antara bangsa-negara Barat bangsa-negara Timur.

## HAM DUNIA KETIGA

Dalam seluruh sejarah umat manusia tidak ada apa pun yang dapat dikatakan bersifat "univer-

sal". Tidak ada apa pun yang abadi dan berlaku untuk segala zaman, tempat dan sejarah sosial. Bahkan hal-hal yang kelihatannya sangat alamiah dan universal seperti kelahiran dan kematian tidak punya makna atau proses yang seragam secara universal.

Yang ada hanyalah mitos, rekaman atau ilusi tentang sejumlah hal yang dikampanyekan seakan-akan universal, alamiah, atau abadi. Misalnya kodrat wanita, cinta kasih pria dan wanita, ketamakan, atau rumusan ilmiah.

HAM juga bukan sesuatu yang universal, walaupun dirumuskan atau diproklamasikan sebagai sesuatu yang diberlakukan secara universal. HAM merupakan produk sejarah modern, seperti halnya apa yang disebut bangsa-negara, masyarakat, atau individu. Jangankan hak asasinya, sedangkan konsep manusia (sebagaimana kini kita pahami) merupakan ciptaan kebudayaan modern.

Karena tidak universal, tidaklah berarti HAM itu kurang berharga atau kurang mulia. HAM merupakan salah satu puncak karya budaya-politik manusia. Mulanya dari masyarakat Barat kemudian mendunia akibat meluasnya kekuasaan politik-ekonomi-budaya Barat. Karena perluasan kekuasaan Barat itu tidak menciptakan kesetaraan derajat antarmanusia maupun antar-

bangsa-negara, maka problema kehidupan kita, kepentingan dan perjuangan kita di dunia juga berbeda-beda. Kita membutuhkan HAM dalam bentuk yang jamak. Bukan hanya satu yang dirumuskan elite Barat bagi selu-

ruh dunia.

Setidak-tidaknya dapat dibedakan HAM untuk masyarakat dunia ketiga dan dunia pertama. Kita membutuhkan versi HAM lain, sebanyak ragam-ragam kesenjangan dan penindasan yang terjadi di dunia pada saat ini (desa-kota, pria-wanita, tua-muda, rasial, kelas-sosial, dan seterusnya). Merumuskan HAM alternatif untuk dunia ketiga menjadi hak bersama masyarakat luas dunia ketiga, bukan monopoli sejumlah negara.

## DUNIA KETIGA

Kia tahu hampir semua negara di dunia ketiga (dan kedua) di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin menolak HAM. Asal-usul gagasan HAM yang dari Barat dijadikan alasan utama penolakan itu. Sepintas lalu kelihatannya berbagai negara ini menolak universalisasi HAM. Tetapi, sebenarnya yang ditolak hanyalah universalisme Barat, untuk digantikan dengan universalisme nasioanal (atau esensialisme keprimbumian) yang rumusannya dimonopoli oleh negara yang mengatasnamakan seluruh rakyat.

Penalaran dan siasat seperti itu sangat kacau, mungkin rakyat di negeri-negeri itu tidak menyanggah cara pemerintahnya. Bukan karena mereka mempercayai tetapi karena mereka dipaksa.

Alasan, apa yang datang dari Barat harus ditolak mentah-men-

tah merupakan alasan menggelikan. Di mana di dunia pada abad ini pengaruh Barat bisa ditolak mentah-mentah? Sudah tak ada lagi satu rimba atau gua yang dapat dijadikan tempat pelarian dan persembunyian bagi sebuah bangsa-negara agar terpisah dari modernitas yang dibentuk Barat.

Terlebih memalukan lagi alasan dunia ketiga yang mengaku bahwa sejarah bangsanya punya esensi, jati diri, atau kepribadian tersendiri yang otonom dan unik. Pada kenyataannya jika ada yang dapat dianggap jati diri bagi bangsa-negara pascakolonial di dunia ketiga itu, maka jati diri yang diandalkan sebagai penangkal tuntutan HAM (dari Barat) itu merupakan hasil bujukan kolonial Barat yang justru ditolaknya.

Indonesia misalnya, teritorinya merupakan buatan kolonial Hindia Belanda. Hukum dan peradilan kita merupakan kelanjutan hukum dan peradilan kolonial.

Antropologi dan filologi kaum orientalis Eropa menciptakan identitas bangsa-bangsa terjajah sebagai bangsa yang seakan-akan "unik" dan seakan-akan punya "jati diri" sendiri. Seakan-akan otonom dari proses penindasan kolonialisme Eropa. Mitos keunikan Timur yang diciptakan Barat tersebut kini digunakan pihak Timur untuk membenarkan pelanggaran HAM di negerinya sendiri.

## KORBANNYA LINTAS BANGSA.

Ada beberapa kesalahpahaman dalam perbincangan HAM selama ini. Pertama, identitas dan kepentingan negara (atau pihak yang

sedang berkuasa) sering dicampur aduk dengan identitas bangsa. Kedua, sering diasumsikan seakan-akan ada pertentangan mendasar antara negara Timur dan Barat dalam soal HAM. Mereka bisa berbeda, tetapi sering saling mendukung. Ketiga, pelanggaran HAM hampir selalu bersifat antarnegara. Bukan kejadian "dalam negeri". Bukan dalam pengertian etika politik (pelanggaran HAM tak pantas dikeskam bangsa lain), tetapi dalam praktik teknis).

Hampir di seluruh kawasan dunia abad ini pelaku pelanggaran HAM terberat adalah aparat kekerasan negara. Tidak hanya negara-negara di Timur. Tragisnya, korban terberat dari pelanggaran HAM oleh berbagai negara itu adalah rakyat sendiri di negeri masing-masing. Biasanya warga sipil yang sangat rentan. Ini terjadi di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kemiripan itu bukanlah kebetulan. Tidak kebetulan pula cara dan bahasa pelanggaran HAM diberbagai negeri itu sangat mirip. Para pengamat HAM seperti Edward Herman dan Noam Chomsky menunjukkan bahwa negeri adikuasa Barat seperti Amerika Serikat adalah sponsor utama terjadinya pelanggaran HAM di berbagai pelosok dunia. Itu sebabnya, berbagai negara Barat yang diuntungkan oleh pelanggaran hak asasi di dunia ketiga suka mendukung penolakan HAM oleh berbagai penguasa pascakolonial.

\* **Ariel Heryanto**, staf pengajar UKSW Salatiga.